

PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI DAERAH

Era Sulastr¹, Alfia Umar², Kharisma Aron Syaputra³, Devina Elani Putri Zohandy⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Wijaya Putra

erasuastr¹99@gmail.com^{1*}, 22031026@student.uwp.ac.id², 22031016@student.uwp.ac.id³,
22031023@student.uwp.ac.id⁴

Abstract

Equitable economic development is an important aspect of reducing the gap between developed and underdeveloped regions in Indonesia. This research aims to analyze the role of the government in equitable economic development, using secondary data from scientific journals, books, and official documents. Regional autonomy policies, infrastructure development, central-regional coordination, and the allocation of financial balancing funds are strategic actions that have been undertaken by the Indonesian government. Through these policies, the national economy has grown, poverty has decreased, and the quality of life for the community has improved. Research results show that the success of equitable development is greatly influenced by adequate infrastructure, quality education, natural resource management, and transparent and effective governance.

Keywords: *Regional development, Economic Growth, Aquitable Development*

Abstrak

Pemerataan pembangunan ekonomi merupakan bagian penting dalam mengurangi kesenjangan antara daerah maju dan daerah tertinggal di Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam pemerataan pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data sekunder dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi. Kebijakan otonomi daerah, pembangunan infrastruktur, koordinasi pusat-daerah, dan alokasi dana perimbangan keuangan merupakan tindakan strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Melalui kebijakan tersebut, perekonomian nasional tumbuh, kemiskinan berkurang, dan kualitas hidup masyarakat meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemerataan pembangunan sangat dipengaruhi oleh infrastruktur yang memadai, pendidikan yang baik, pengelolaan sumber daya alam, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif.

Kata kunci: Pembangunan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Pembangunan

Pendahuluan

Pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola sumber daya ekonomi di wilayahnya, termasuk dalam hal anggaran dan pembangunan infrastruktur. Dari segi hukum, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 yang merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, guna meminimalkan risiko konflik hukum. Dalam perspektif sosiologi, intervensi pemerintah daerah dalam ekonomi dapat mengubah struktur sosial, memengaruhi distribusi kekayaan, serta menciptakan peluang dan tantangan baru bagi para pelaku usaha.

Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah daerah memainkan peran penting dengan merancang kebijakan yang mendukung investasi, memberikan insentif untuk usaha kecil dan menengah, serta menyediakan infrastruktur guna mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Regulasi yang jelas serta pelaksanaan hukum yang konsisten sangat diperlukan untuk

memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana.

Masyarakat dapat memahami lebih jauh bagaimana kebijakan ekonomi dapat memengaruhi dinamika sosial-ekonomi dengan menelaah keterkaitan antara pemerintah daerah, hukum, dan sosiologi. Kebijakan ekonomi ini mencakup langkah-langkah strategis pemerintah dalam mengatur berbagai aspek ekonomi, seperti distribusi sumber daya, pengendalian inflasi, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Menurut pandangan Ndraha (1987:11), pemerintah memiliki cakupan peran yang luas dalam membangun masyarakat, mulai dari memberikan layanan operasional hingga menjaga aspek ideologis dan spiritual. Dengan otoritasnya, pemerintah mampu melaksanakan tugas pokoknya sebagai pemimpin untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Tiga fungsi utama pemerintahan meliputi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelayanan yang baik mampu menciptakan keadilan, pemberdayaan memupuk kemandirian masyarakat, sementara pembangunan meningkatkan kesejahteraan bersama. Melalui pengambilan keputusan ekonomi yang melibatkan berbagai pihak, pembangunan daerah dapat lebih efektif dalam menghadapi berbagai kendala yang ada.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengeksplorasi peran pemerintah dalam pemerataan pembangunan di Indonesia. Pendekatan ini mencakup pengumpulan dan analisis berbagai sumber literatur akademis serta data sekunder dari penelitian sebelumnya. Dengan demikian, peneliti dapat mengeksplorasi teori, konsep, dan temuan terkait tanpa perlu melakukan pengumpulan data primer.

Data penelitian diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang diakses melalui platform terpercaya seperti Google Scholar dan Publish or Perish untuk mencari artikel akademis dan menganalisis data kutipan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan publikasi dari situs resmi pemerintah, organisasi internasional, serta lembaga penelitian yang menyediakan informasi terbaru tentang kebijakan pemerataan pembangunan dan ekonomi di Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti mampu mengintegrasikan berbagai perspektif untuk menghasilkan kesimpulan yang mendukung tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Di Indonesia, usaha untuk meratakan pembangunan sangat krusial dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah, khususnya antara daerah berkembang dan daerah tertinggal. Pemerintah telah menginisiasi berbagai program, seperti dana Desa dan pembangunan infrastruktur di wilayah kurang berkembang, untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Meski demikian, efektivitas program-program ini masih memerlukan peningkatan agar lebih tepat sasaran dan dapat menghasilkan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, perhatian yang berkelanjutan terhadap kebijakan pembangunan sangat penting untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Pemerataan pembangunan membuka akses lebih luas bagi seluruh daerah terhadap peluang ekonomi, infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat nasional. Selain itu, pemerataan pembangunan berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan politik dengan mengurangi potensi konflik akibat ketidakadilan ekonomi. Pendekatan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, di mana setiap wilayah dapat berkontribusi optimal terhadap perekonomian nasional. Lebih lanjut, pemerataan pembangunan memungkinkan pemanfaatan

sumber daya alam secara lebih efisien di daerah yang sebelumnya kurang berkembang, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Siregar dkk., 2025).

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menetapkan tanggung jawab negara dalam mengelola sektor ekonomi yang strategis. Berdasarkan pasal ini, negara mengatur cabang-cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, peran negara difokuskan pada sektor-sektor strategis yang berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat, sementara sektor lainnya dikelola oleh pihak swasta. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah pusat yang mewakili negara dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah melalui berbagai langkah strategis. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah pusat yang mewakili negara dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah seperti :

1. Dalam upaya menata kembali perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan perlu disesuaikan dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN berperan sebagai pedoman dalam menjalankan tanggung jawab tata usaha negara. Namun, setelah peristiwa tersebut, banyak pihak berkomentar bahwa GBHN tidak diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa sistem demokrasi hanya akan menghasilkan pemerintahan yang berjalan secara otomatis.
2. Implementasi rencana strategi nasional (PSN). Pemerintah pusat dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah ini dengan mengembangkan infrastruktur pembangunan jika diperlukan. Langkah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang memadai mempermudah transportasi, meningkatkan koneksi regional, dan mempermudah akses ke sumber daya dan pasar.
3. Memastikan distribusi sumber daya kompensasi keuangan yang adil antara pusat dan daerah. Dengan pendekatan yang berorientasi pada kepedulian, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kebutuhan serta potensi ekonomi masing-masing daerah, sekaligus memberikan dukungan keuangan yang tepat guna membantu pengembangan sektor ekonomi di setiap daerah.
4. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dianggap sebagai langkah penting dalam mengembangkan sektor ekonomi di daerah. Pertemuan rutin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilakukan untuk membahas kebijakan dan program pembangunan ekonomi. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, dipastikan bahwa otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi di daerah (SETIADY, Tri, et al. 2023).

Proses yang melibatkan perubahan mendasar dalam sikap masyarakat, struktur sosial, dan lembaga nasional, serta pengurangan ketimpangan, percepatan pertumbuhan, dan pemberantasan kemiskinan dikenal sebagai pembangunan. Menurut para ekonom, dua komponen utama pembangunan adalah proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ekonomi. Yang terakhir mengacu pada pemerataan pembangunan ekonomi, yang berarti bahwa hasil pembangunan didistribusikan secara lebih merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antara daerah maju dan daerah terbelakang.

Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Daerah

Dalam mencapai tujuan nasional dengan lebih cepat dan efektif, pembangunan ekonomi di tingkat daerah perlu diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini melibatkan perubahan signifikan dalam struktur ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, serta peningkatan total pendapatan dan pendapatan per kapita. Agar tujuan ini tercapai,

diperlukan sinkronisasi kebijakan ekonomi makro yang mencakup aspek moneter, fiskal, sektor riil, dan neraca pembayaran.

Pemerintah harus mendukung kebijakan ekonomi makro yang kuat dengan mengelola keuangan daerah agar selaras dengan kebijakan keuangan nasional. Sebagian besar anggaran digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah pusat dan pelayanan masyarakat, selain alokasi dana yang ditransfer ke pemerintah daerah. Dana transfer ini mencakup berbagai bentuk, seperti hibah, bantuan subsidi, pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta program bantuan sosial seperti PNPM dan Jamkesmas. Sekitar 60% dari anggaran negara dialokasikan untuk daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah dapat berkembang dengan lebih efisien dan seimbang.

Pertumbuhan ekonomi di tingkat regional merupakan proses peningkatan kapasitas produksi yang tercermin dari peningkatan pendapatan regional atau nasional. Suatu negara dianggap mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan pendapatan riil. Indikator ini sering digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi didorong oleh perencanaan yang baik. Namun, terdapat berbagai faktor menjelaskan perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi terletak pada sifatnya. Pertumbuhan ekonomi lebih bersifat angka dan kuantitatif, terlihat dari peningkatan pendapatan rata-rata dan output produksi. Sebaliknya, pembangunan ekonomi mencakup aspek yang lebih kualitatif, seperti peningkatan efisiensi alokasi sumber daya di berbagai sektor, serta perubahan dalam aspek sosial, teknis, pengetahuan, dan kelembagaan.

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara berkelanjutan. Pemahaman ini sejalan dengan tujuan desentralisasi yang melibatkan aspek politik dan administratif. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat diukur dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sebagai hasil langsung dari kebijakan yang diterapkan.

Berdasarkan laporan pada tahun 2010 tentang kajian otonomi daerah, terdapat lima faktor utama yang menyebabkan kebijakan otonomi daerah tidak mencapai hasil yang optimal, yaitu:

- a. Kekurangan dana yang menyebabkan gagalnya pelaksanaan program.
- b. Kesalahan dalam administrasi, di mana meskipun kebijakan yang disusun sudah baik, administrasi yang buruk dapat menyulitkan implementasinya.
- c. Pertimbangan kebijakan yang kurang komprehensif karena hanya fokus pada beberapa aspek tertentu.
- d. Kebijakan publik yang tidak sejalan atau bertentangan antara satu dengan yang lainnya.
- e. Upaya penyelesaian masalah besar yang tidak seimbang dengan sumber daya yang tersedia, sehingga tidak efektif dalam mengatasi bobot permasalahan tersebut.

Pembangunan Daerah

Pemerintah daerah beserta masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan memacu perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di daerah, yang disebut dengan pembangunan daerah. (Lincoln Arsyad, 2000).

Pemerintah daerah menggunakan sumber daya manusia, kelembagaan, dan fisik lokal dalam kebijakan pembangunan. Organisasi ini mendukung inisiatif lokal selama proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian.

Tujuan utama pembangunan daerah adalah memperluas jumlah dan ragam peluang kerja bagi masyarakat setempat. Untuk mewujudkannya, pemerintah daerah dan masyarakat

perlu berkolaborasi dalam mengambil inisiatif untuk mendorong pembangunan daerah. Dengan partisipasi dari masyarakat dan dukungan sumber daya yang ada, pemerintah perlu mengidentifikasi dengan menghitung potensi sumber daya yang dibutuhkan agar dapat merancang dan mengembangkan perekonomian daerah secara efektif.

Pengembangan Masyarakat

Pembangunan ekonomi tidak dapat dilakukan tanpa meningkatkan kualitas dan keterampilan sumber daya manusianya. Oleh karena itu, strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan komponen terpenting dalam proses pembangunan ekonomi. Menurut Windusancono, B. A. (2021) bahwa terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja manusia:

- a. Sistem pelatihan yang disesuaikan, yaitu sistem pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan karyawan.
- b. Pembentukan bank keanggotaan, yang juga dikenal sebagai “bank keterampilan”, yaitu bank informasi yang menghimpun informasi tentang latar belakang dan keanggotaan orang-orang yang menganggur dan berkontribusi pada pembentukan lingkungan yang mendukung pengembangan lembaga pendidikan dan keterampilan di wilayah tersebut.
- c. Menciptakan program pendidikan khusus untuk para penyandang disabilitas. Pendekatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk memperkuat kelompok masyarakat tertentu di suatu wilayah.

Di Indonesia, kegiatan seperti ini mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa waktu terakhir karena kebijakan ekonomi secara umum masih belum mampu memberikan dukungan yang cukup bagi kelompok masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah menciptakan manfaat sosial, seperti melalui pengembangan proyek padat karya guna memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh keuntungan dari usaha yang dijalankan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar Rp413,8 triliun dalam APBN 2021. Anggaran ini difokuskan pada pengembangan fasilitas kesehatan masyarakat agar kebutuhan dasar terpenuhi dan sistem kesehatan nasional meningkat. Selain itu, anggaran tersebut dialokasikan untuk penguatan infrastruktur digital, peningkatan efisiensi logistik, serta pembangunan infrastruktur padat karya yang mendukung industri di wilayah tersebut, termasuk penyelesaian kegiatan pada pos sebelumnya yang tertunda pada tahun 2020.

Pembangunan fisik perlu diimbangi dengan pembangunan nonfisik, seperti pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, agar tercipta daya saing yang tinggi dan kemampuan bersaing dalam aspek sosial dan ekonomi. Menurut Budiono, eksekutif maupun legislatif tidak boleh mendominasi proses pembangunan dalam menentukan langkah atau kebijakan tertentu. Pembangunan ekonomi yang kuat harus disertai dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan kompeten. (Rodzi, M. F. 2023).

Pemerataan pembangunan ekonomi difokuskan pada dimensi sosial, seperti menekan angka kemiskinan, memperluas akses pendidikan, serta meningkatkan layanan kesehatan, infrastruktur, dan menciptakan kesempatan ekonomi yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan pembangunan ekonomi penting karena beberapa alasan:

- a. Mengurangi Kesenjangan Sosial.
Ketimpangan ekonomi sering kali menyebabkan perpecahan sosial, ketidakstabilan politik, dan gangguan keamanan. Dengan adanya pemerataan, masyarakat di berbagai wilayah mendapatkan akses yang lebih optimal terhadap sumber daya, sehingga meningkatkan rasa keadilan dan kestabilan sosial.

- b. Meningkatkan Produktivitas Nasional.
Ketika sumber daya manusia di berbagai wilayah diberdayakan melalui akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, produktivitas nasional akan meningkat. Pembangunan yang hanya terpusat di satu wilayah akan menghambat potensi daerah lain.
- c. Memperkuat Ekonomi Daerah.
Daerah-daerah yang tertinggal memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dengan memperkuat ekonomi daerah, pemerintah dapat mengurangi arus urbanisasi dan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar.
- d. Memastikan Pembangunan yang Berkelanjutan.
Pembangunan yang merata memastikan bahwa tidak ada daerah yang tertinggal dan semua wilayah dapat berkembang dengan potensi yang dimiliki. Ini akan mendorong pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemerataan Pembangunan Ekonomi

Pemerataan pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

1. Infrastruktur yang memadai
Infrastruktur merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi. Akses terhadap jalan raya, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Wilayah yang memiliki infrastruktur yang baik dapat lebih mudah mengakses pasar, menarik investor, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Sumber Daya Alam dan Modal
Sumber daya alam (SDA) yang melimpah tidak selalu menjamin kesejahteraan jika pengelolaannya tidak adil. Pemanfaatan SDA harus dilakukan dengan bijaksana, dan keuntungannya harus dirasakan oleh masyarakat lokal. Selain itu, modal investasi harus diarahkan ke daerah-daerah yang belum berkembang agar potensi SDA dapat dimaksimalkan.
3. Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Kualitas SDM menjadi salah satu faktor penentu dalam pemerataan pembangunan ekonomi. Daerah yang memiliki pendidikan yang baik cenderung memiliki tenaga kerja yang lebih produktif dan inovatif. Sayangnya, akses pendidikan di beberapa daerah terpencil masih terbatas. Oleh karena itu, penting guna meningkatkan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia agar SDM dapat berkontribusi lebih maksimal terhadap pembangunan ekonomi.
4. Pemerintahan yang Baik dan Efisien
Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat kebijakan yang mendukung pemerataan pembangunan. Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi akan menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi dan pembangunan. Kebijakan yang pro-rakyat dan fokus pada pengurangan ketimpangan juga sangat diperlukan.

Simpulan dan Saran

Pemerataan pembangunan ekonomi memainkan peran penting tidak hanya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah, tetapi juga dalam mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mewujudkan stabilitas sosial-politik. Kebijakan yang dirancang oleh pemerintah pusat, seperti program Dana Desa, Proyek Strategis Nasional, dan pengembangan infrastruktur, menunjukkan kontribusi konkret untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di kawasan yang masih tertinggal.

Namun demikian, berbagai kendala masih menghambat pencapaian pemerataan pembangunan. Kendala-kendala ini mencakup kurangnya ketersediaan infrastruktur, terbatasnya akses pendidikan, pengelolaan sumber daya yang kurang optimal, serta implementasi kebijakan yang sering kali tidak konsisten. Untuk mengatasi hambatan ini, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi, yang mempertimbangkan potensi dan kebutuhan lokal, mendorong transparansi dalam tata kelola pemerintahan, meningkatkan kapasitas SDM, serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan ekonomi yang berkeadilan hanya dapat dicapai melalui sinergi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi ini harus didukung oleh kebijakan yang inklusif dan dirancang untuk memberikan manfaat bagi semua kelompok masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdul Rohman, (2023,27 Maret). Pemerataan Melalui Proyek Nasional. Diakses pada 20 Januari 2025, dari <https://feb.ub.ac.id/pemerataan-melalui-proyek-strategis-nasional/>
- Anugrah Dwi, (2023, 29 Mei). Kebijakan Pembangunan Ekonomi. Diakses pada 20 Januari 2025, dari <https://feb.umsu.ac.id/kebijakan-pembangunan-ekonomi/>
- Anugrah, Fajrian Noor, (2021). Kewenangan Tata Kelola Lingkungan Hidup Oleh Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 9, No. 2, pp. 204–22
- Darajati, Muhammad Rafi. (2023) *Ekonomi Biru: Peluang Implementasi Regulasi Di Indonesia*. The Journalish: Social and Government, Vol. 4, No. 5, pp. 41– 53
- Djadjuli, R Didi. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 2, 2018, pp. 1–14.
- Herdiana, D. (2022). Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Transformative*, 8(1), 1-30.
- Khaerunissa, S., Hasanah, B., & Sururi, A. (2023). Kapasitas Inovasi Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan dalam Mendukung Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2).
- Muallif, (2024, 16 September). Mengapa Pemerataan Pembangunan Ekonomi Penting bagi Indonesia?. Diakses pada 20 Januari 2025, dari (https://an-nur.ac.id/mengapa-pemerataan-pembangunan-ekonomi-penting-bagi-indonesia/#1_Pengembangan_Infrastruktur_di_Daerah_Terpencil).
- Rodzi, M. F. (2023). Pembangunan Infrastruktur Dan Pemerataan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Desa*, 3(2), 151-163.
- Setiady, T., & Astawa, I. K. (2023). Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(3), 59-72.
- Siregar, A. R. S., Lubis, N. H., Isfa, F., & Muzayyana, M. (2025). Pentingnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 5(1), 51-64.
- Windusancono, B. A. (2021). Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Di Indonesia. *Mimbar Administrasi*, 18(1), 89-105.